

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pembagian daerah di Republik Indonesia terdiri atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintah negara dan hak asal-usul yang bersifat istimewa seperti marga dan dusun. Satu bentuk pembagian daerah terkecil dan disebut juga satuan pemerintahan terkecil adalah desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan miniatur dari bangsa dan negara mengingat terdapat unsur-unsur yang ada dalam negara Indonesia seperti wilayah tempat masyarakat berkumpul dan bertempat tinggal, masyarakat sebagai pemegang kedaulatan dan pemerintahan yang berfungsi mengatur masyarakat. Sehingga dalam desa dapat di gunakan sebagai cermin dari indonesia karena di dalam desa terdapat aspek-aspek yang saling mempengaruhi dalam masyarakat desa seperti juga sistem politik yang mengatur desa tersebut sebagaimana yang terdapat dalam negara.

Pada penyelenggaraan sistem pemerintahan desa telah dikenal sistem demokrasi yang terlihat dengan adanya musyawarah yang dilakukan untuk mencapai mufakat dalam membahas permasalahan yang terdapat dalam desa. Dalam musyawarah ini masyarakat desa memiliki hak suara untuk dapat berkumpul dan mengajukan aspirasinya. Bentuk lain dari sistem demokrasi di desa dapat dilihat dalam proses pemerintahan dalam pemilihan pemimpin desa yang akan memimpin desanya.

Pemilihan kepala desa di berbagai daerah pedesaan selama ini memang selalu menarik untuk dicermati. Hal ini dikarenakan pemilihan kepala desa merupakan bentuk dari demokrasi asli yang ada di dalam pemerintahan Indonesia. Anggapan merupakan bagian dari upaya melestarikan cara memilih Kepala Desa sebagai wujud demokrasi di desa, yang mana Kepala Desa dipilih secara langsung oleh segenap warga masyarakat desa sejak dahulu hingga saat ini.

Selain itu, pada tahap pemilihan kepala desa selalu terjadi proses interaksi komunikasi politik antara calon kepala desa dengan masyarakat desa, menurut Brian Mc Nair (dalam Junaedi, 2013:24) komunikasi politik merupakan semua bentuk komunikasi yang dilakukan oleh aktor-aktor politik untuk mencapai tujuan khusus. Aktor politik yang dimaksud adalah calon kepala desa dengan menyampaikan pesan-pesan politik dalam hal ini visi dan misi serta janji-janji politik lainnya.

Demokrasi di desa diwujudkan dengan dilakukannya pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat. Demokrasi dalam konteks pemilihan kepala desa (Pilkades) dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap

politik partisipatif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat desa. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengakui dan menghormati pemerintahan desa untuk melaksanakan hak dan kewenangan dalam mengurus rumah tangganya sesuai dengan hak asal usul serta adat istiadat setempat.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan peraturan yang di bentuk pemerintah Kabupaten Bandung sebagai tindak lanjut dari UU No 6 Tahun 2014 dan juga sebagai payung hukum penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Kabupaten Bandung.

Pada tahun 2015 di wilayah Kabupaten Bandung dilaksanakan pemilihan kepala desa serentak, dimana pemilihan serentak ini dilaksanakan oleh Kecamatan Canguang. Pemilihan kepala desa yang sering di singkat pilkades bukan istilah yang asing lagi untuk saat ini. Sebagai wadah untuk menampung aspirasi politik rakyat sekaligus sebagai sarana pergantian atau kelanjutan pemerintahan desa. Pilkades merupakan *instrument* dalam pembentukan pemerintahan modern dan demokratis. Pemilihan Kepala Desa sebagai ajang konsolidasi politik di tingkat desa memberi pendidikan politik yang mencerdaskan masyarakat.

Pada bulan April Tahun 2015 di Desa Jatisari telah melakukan pesta Demokrasi dengan 3 orang calon kandidat berdasarkan nomor urut:

Tabel 1.1.
Tingkat Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Kepala Desa Jatisari
Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Tahun 2015.

No.	Nama Calon Kepala Desa	Surat Suara yang Sah	Surat Suara yang Rusak/Tidak Sah
1.	Rukmana	2185	30
2.	Yana Suryana	936	
3.	Gaos, S.Sos	1490	
Jumlah Surat Suara		4611	30

Sumber: Panitia Pemilihan Kepala Desa Jatisari Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas maka telah terpilih kepala desa pada saat pemilihan bulan April 2015 yaitu dengan jumlah suara keseluruhan atau yang ikut berpartisipasi mencapai 4.611 suara. Sedangkan jumlah suara yang tidak sah ada 30 suara.

Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa bermacam cara yang dilakukan oleh ketiga calon kepala desa tersebut dalam mencari suara masyarakat Desa Jatisari, baik itu kampanye maupun sosialisasi seperti pada waktu yang sama dari ketiga calon melakukan kampanye bersamaan di satu tempat menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat agar masyarakat sendiri bisa menilai mana visi dan misi dari masing-masing calon yang bisa masuk kedalam kriteria pilihan masyarakat. Kampanye politik yang dilakukan oleh calon kepala desa menjadi sorotan masyarakat dalam bersosialisasi sebab selain melakukan kampanye dan temu ramah bersamaan juga setiap calon melakukan sosialisasi kerumah-rumah warga untuk memperkenalkan diri serta visi misinya menjadi calon dan bahkan

adanya pemasangan baliho-baliho gambar calon kandidat disetiap Rukun Tetangga (RT) dan tempat keramaian di Desa Jatisari.

Berhubungan karena agenda penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa merupakan momentum yang strategis dalam upaya mewujudkan demokratisasi ditingkat terendah, maka proses pemilihan Kepala Desa tersebut semestinya dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Undang-Undang.

Berdasarkan hasil observasi awal dilapangan yang dilakukan oleh peneliti bahwa tidak optimalnya komunikasi politik yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa Jatisari yaitu sebagai berikut:

1. Sebagian besar calon kepala desa hanya melakukan kampanye jangka pendek yang dicirikan dengan aktivitas pengumpulan massa, parade, orasi politik, pemasangan umbul-umbul, poster dan spanduk. Kampanye seperti ini hanya akan menghabiskan biaya yang tinggi sedangkan masyarakat belum tentu memberikan suaranya kepada kandidat tersebut pada saat pencoblosan.
2. Calon kepala desa hanya memposisikan pemilih sebagai objek yang tidak memiliki kebebasan untuk memilih sesuai keinginan mereka. Seharusnya calon kepala desa memposisikan atau menjadikan pemilih sebagai subyek yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan mereka sesuai hati nurani mereka tanpa adanya tekanan eksternal yang mana menjadikan program kerja kandidat sebagai landasan dalam memilih.
3. Adanya pengaruh dari kelompok yang berkepentingan pada saat pemilihan berlangsung yang bertujuan dapat mempengaruhi masyarakat Desa pada saat

pemberian suara berlangsung dengan cara memberikan imbalan atas partisipasinya memilih kandidat sesuai dengan keinginan kelompok tadi.

4. Keberadaan media massa sebagai *instrument* komunikasi politik pada level desa sangat jarang.
5. Sebagian besar masyarakat (pemilih) di Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang kurang merespon dan kurang antusias dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya ke dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul sebagai berikut:

“Komunikasi Politik Calon Kepala Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung Tahun 2015”.

1.2. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini dimaksudkan untuk menyamakan pemahaman dan memperjelas fokus dari objek yang menjadi permasalahan penelitiannya. Dengan demikian analisis yang dilakukan terhadap permasalahan penelitian akan semakin terfokus dan terarah, pemaknaannya. Hal ini juga dimaksudkan untuk memberi arah dan sasaran yang jelas bagi objek penelitiannya. Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Komunikasi politik yang dilakukan oleh calon kepala desa Jatisari pada Pemilihan Kepala Desa tahun 2015 seperti apa dan apakah komunikasi

politik yang dilakukan oleh calon kepala desa Jatisari tersebut sudah optimal atau belum dalam pelaksanaannya pada Pemilihan Kepala Desa tahun 2015.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan permasalahan atau fenomena yang sudah dipaparkan oleh peneliti, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana komunikasi politik calon Kepala Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung tahun 2015?
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Komunikasi Politik Calon Kepala Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung tahun 2015?
3. Usaha-usaha Komunikasi Politik yang Dilakukan oleh Calon Kepala Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung tahun 2015?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis Bagaimana komunikasi politik calon Kepala Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung tahun 2015
2. Mendeskripsikan dan menganalisis Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat Komunikasi Politik Calon Kepala Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung tahun 2015
3. Mendeskripsikan dan menganalisis Usaha-usaha Komunikasi Politik yang Dilakukan oleh Calon Kepala Desa Jatisari Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung tahun 2015.

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bermanfaat bagi Ilmu Pengetahuan dalam kajian Ilmu Pemerintahan. Juga diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan untuk melakukan penelitian selanjutnya
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Desa Jatisari serta menjadi acuan bagi calon kandidat dalam Pilkades mengenai komunikasi politik sehingga menjadi bahan penyusunan strategi kampanyenya.

